

# **KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIDESA KOTO TUO KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**YESTIKA RAHMATULLAILI**

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.

email: [yestika9727@gmail.com](mailto:yestika9727@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the Village Chief's Policy in Increasing Public Awareness to Pay Land and Building Taxes in the Village Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. The problem of this research has not been the maximum policy of the village head in raising public awareness to pay for land and building tax in the village Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi this is due to an error from the taxation institution in measuring the land so that the community does not want to pay taxes this is seen from the recapitulation of per-tax tax decreases. The type of this research is qualitative research while the informants in this study amounted to 12 people consisting of village heads, heads of development affairs, and village communities, who became key informants namely the village head. The data sources used are primary data and secondary data, while the data collection methods carried out are observation, interviews, documentation, and triangulation. With the method of qualitative interactive model data analysis. Based on the result of research obtained through interviews, observation and documentation, it is understood that the obligations of the village community is willing to comply with the policy of the village head to obey the rules for paying land and building taxes in Koto Tuo Kopah 99,9%.*

**Keywords: Policy PBB**

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan penelitian ini belum maksimalnya kebijakan kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan Bangunan Di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi hal ini dikarenakan adanya kesalahan dari lembaga perpajakan dalam pengukuran tanah sehingga masyarakat tidak mau membayar pajak hal ini dilihat dari rekapitulasi pajak peretahun menurun. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang terdiri dari kepala desa, kepala urusan pembangunan, dan masyarakat desa, yang menjadi informan kunci yaitu kepala desa. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Dengan metode analisis data model interaktif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat melalui wawancara, obeservasi dan dokumentasi dapat dipahami bahwa kebijakan kepala desa berperan dengan baik sehingga masyarakat desa sudah mau mematuhi kebijakan kepala desa tersebut untuk taat akan peraturan membayar pajak bumi dan bangunan sehingga pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa koto tuo kopah mencapai 99,9%.*

**Kata Kunci : Kebijakan PBB**

## 1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu upaya dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata dengan menyelenggarakan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan memberikan otonomi luas pada daerah, diharapkan untuk dapat mempererat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintah di berikan kepada daerah agar dapat terlaksana secara nyata dan bertanggung jawab, serta di ikuti dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil. Termasuk pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Pada dasarnya warga Indonesia berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan melakukan kegiatan. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan dapat mengatur kepentingan rakyat maka roda pemerintahan harus berjalan dengan lancar. Untuk itu, dibutuhkan biaya yang berasal dari pajak, salah satunya pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai seberapa jauh pengaruh kebijakani terhadap kesadaran masyarakat untuk itu peneliti mengambil judul penelitian: “Kebijakan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”’.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1 Ilmu Administrasi Negara

Menurut Sondang P. Siagian, ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus yang melalui objek ilmiah yang memiliki percobaan yang sistematis dilakukan yang berulang kali, telah teruji kebenarannya. Prinsip-prinsip dalil-dalil dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari (Syafiie, 2010: 3)

Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *administrare* yang berarti melayani, membantu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, menggunakan istilah *administration* yang sebenarnya dari kata *Ad* (*intensif*) dan *ministrare* (*to serve*) yang berarti melayani.

#### 2.1.2 Kebijakan

Kebijakan secara umum adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari

kata *policy*. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatankegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

### **2.1.3 Kesadaran Masyarakat**

Penelitian Rogers (1974) mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru, didalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan yakni :

1. *Awareness* (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu.
2. *Interest*, yakni mulai tertarik pada stimulus.
3. *Evaluation*, menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.
4. *Trial*, orang telah mulai mencoba perilaku baru
5. *Adoption*, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.

kesadaran diartikan sebagai kondisi terjaga atau mampu mengerti apa yang sedang terjadi. Kedua kesadaran diartikan sebagai semua ide, perasaan, pendapat, dan sebagainya yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Selain itu kesadaran diartikan sebagai pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya.

### **2.1.4 Desa**

Menurut Soetardjo dalam Thomas (2013) desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat. Bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.1.5 Pajak**

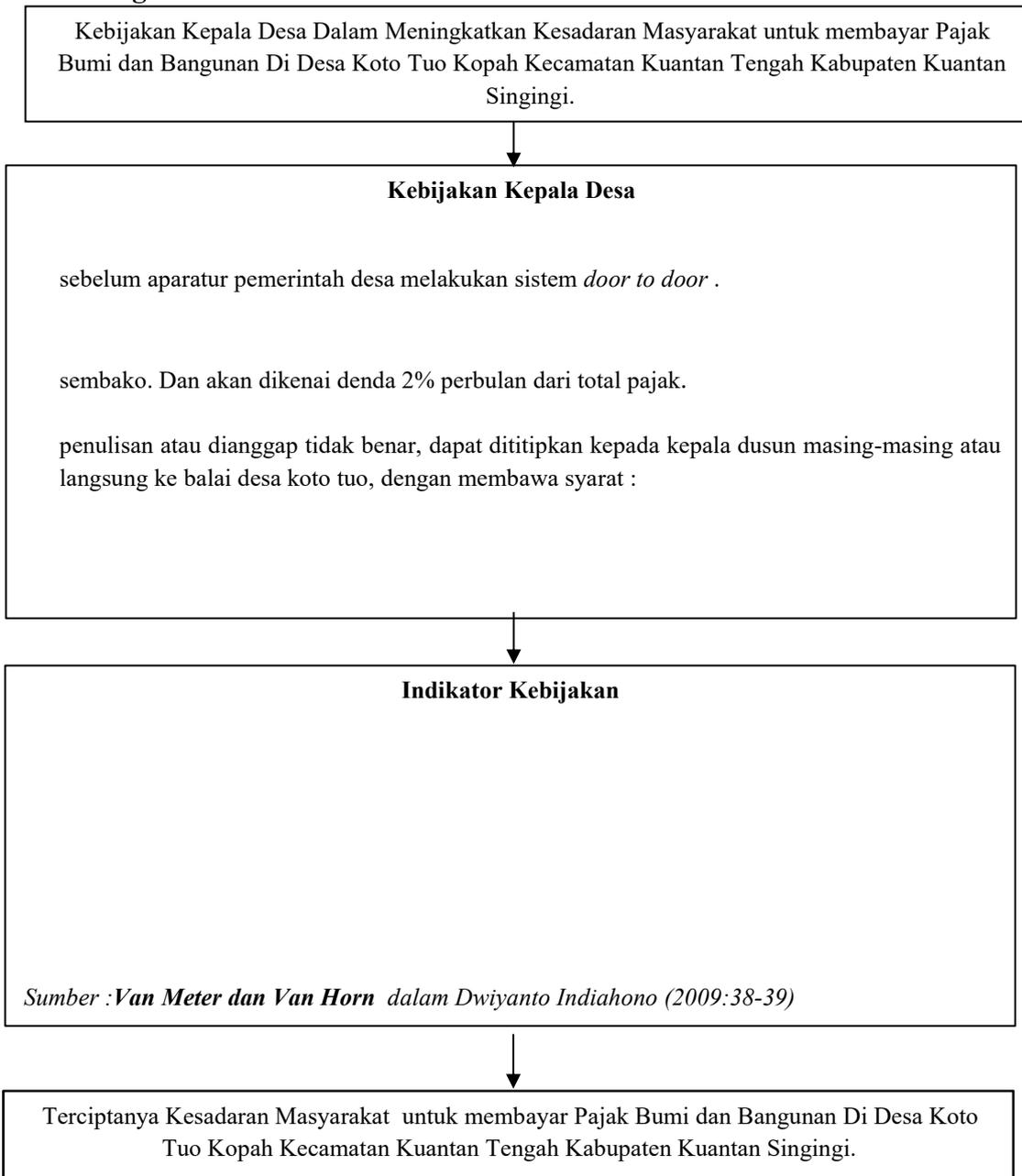
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia dalam hal ini Undang-Undang No. 12 tahun 1985, telah dijelaskan tentang pengertian pajak secara umum maupun landasan penerapan Pajak Bumi dan Bangunan.

1. Pajak adalah merupakan salah satu sumber penerimaan negara sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunannasional sebagai pengamalan pancasila yang bertujuan untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikeloladengan meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan kemampuannya.
2. Bumi dan bangunan adalah memberikan keuntungan dan ataukedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yangmempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya,dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan sebagian manfaat atau kenikmatan yang diperoleh kepada negara melalui pajak (1985).

### **2.1.6 Manajemen Sumber Daya Manusia**

Nawawi dalam Irham (2016: 1) mengemukakan bahwa Sumber daya manusia adalah sebagai salah satu unsur dalam organisasi dapat diartikan sebagai manusia yang bekerja dalam suatu organisasi. SDM juga disebut dengan personil, tenaga kerja, pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya atau potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal nonmaterial dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

## 2.2. Kerangka Pemikiran



Sumber: modifikasi Peneliti 2019

## 2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : “Diduga Kebijakan Kepala Desa Belum Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.”

## 2.4 METODE PENELITIAN

### 2.4.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kualitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Sugiyono, 2017: 7)

### 2.4.2 Informan

Teknik penentuan sampling yang peneliti gunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

No	Unsur/Informan	Jumlah	Persentase %
		Informan	
1	Kepala Desa	1	8,33
2	Kepala Urusan Pembangunan	1	8,33
3	Masyarakat Desa	10	83,33
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>100%</b>

### 2.4.3 Sumber Data Penelitian 50

#### Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari keterangan yang diberikan oleh responden dilapangan. Responden merujuk kepada individu atau seseorang yang dapat memberikan informasi dasar mengenai masalah yang akan diteliti yaitu hasil dari wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.

#### Data Sekunder

Yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

### 2.4.4 Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini pada Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena ingin tahu seberapa besar Kebijakan Kepala Desa dalam meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

### 2.4.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu Kebijakan Kepala Desa dalam meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

### 2.4.6 Metode Pengumpulan Data

#### Observasi

Menurut Sugiyono (2008 :162) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan dengan

observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

#### **Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, dan jumlah responden yang sedikit/kecil (Sugiyono, 2017:157).

#### **Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2009:240).

#### **Triangulasi**

Triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

### **2.4.7 Metode Analisis Data**

#### **Reduksi Data**

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.

#### **Penyajian Data (*Display Data*)**

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

#### **Penarikan Kesimpulan**

Merupakan tahap akhir proses pengumpulan data yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Indikator Standar**, sasaran kebijakan kepala desa dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan adalah masyarakat wajib pajak agar terpenuhinya penerimaan pajak di Desa Koto Tuo setiap tahun pajak sehingga tidak ada lagi masyarakat yang lalai membayar pajak Bumi dan Bangunan sehingga dijadikan pembaruan pajak sebagai kebutuhan dan tanggung jawab dari keluarga.

**Indikator Kinerja**, kinerja pencapaian kebijakan kepala desa di Desa Koto Tuo dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sangat baik dan tinggi tingkat pencapaiannya, hal ini dapat dilihat dari wawancara penulis dengan berbagai informan baik dan pihak pemerintahan atau dari masyarakat itu sendiri bahwa adanya semangat dan motivasi serta tanggung jawab masyarakat wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan tahun pajak.

**Indikator Sumber Daya**, Sumber Daya pencapaian kebijakan kepala desa di Desa Koto Tuo dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

**Indikator Komunikasi**, kebijakan kepala desa dalam meningkatkan kesadaran

masyarakat desa Koto Tuo dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sudah baik bahkan koordinasi dan komunikasi antar kelompok berjalan dengan baik sesuai dengan arahan dan intruksi dari kepala desa.

**Indikator Karakteristik**, kebijakan kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat desa Koto Tuo dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sudah baik nilai-nilai kesadaran dan saling percaya antara masyarakat dengan petugas pemungutan pajak terjalin dengan baik, penyampaian intruksi dan komunikasi internal dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan dilaksanakan dengan sangat baik oleh kepala desa kepada petugas pemungutan pajak, perangkat desa sampai proses ke masyarakat disampaikan secara formal maupun nonformal.

**Indikator Lingkungan Sosial**, kebijakan kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat desa Koto Tuo dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sudah baik jika dilihat dari karakteristik lingkungan sosial tidak menemui kendala yang berarti sehingga penerapan kebijakan berjalan dengan baik. Masyarakat sebagai wajib pajak yang merupakan lingkungan implementasi menerima dengan jelas kebijakan kepala desa tentang pajak, meskipun ada sebagian masyarakat yang terpengaruh dari lingkungan luar karena perbedaan jumlah pembayaran namun sudah diluruskan dan di berikan penyuluhan lengkap oleh petugas pemungutan pajak , termasuk pemerinttahan desa koto tuo.

**Indikator Sikap Pelaksana**, Sikap Pelaksana dalam pencapaian kebijakan Kepala Desa dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bagunan di Desa Koto Tuo sudah sangat baik dalam merespon dan menanggapi pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Koto Tuo masyarakat wajib pajak memberikan tanggapan dan respon yang baik terhadap kebijakan Kepala Desa dalam meingkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

### **Kesimpulan**

Kebijakan Kepala Desa Belum Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Segala Puji peneliti panjatkan kepada Allah SWT Karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga peneliti berkesempatan menimbah ilmu hingga jenjang Perguruan Tinggi dan peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpa curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.Sos) Pada program Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Judul skripsi peneliti adalah **“Kebijakan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Didesa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang tulus

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Desriadi, S.Sos., M. Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak Alshar Andri, S.Sos., M. Si Selaku dosen pembimbing 1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M. Si Selaku dosen pembimbing 2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan ilmu selama di bangku kuliah.
7. Ayahanda tercinta Khaidir Anwar (Alm), dan Ibunda tercinta Ardinis yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya dan juga yang selalu member semangat untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak dan Abang tersayang Desri Yelly., SE, Tri Nola Anita., Amd. Keb, Sutan Abidin., SE, Febri Mayoka., SP yang telah memberikan semangat, motivasi untuk selalu berusaha dengan baik dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat Tata Julita, Yovi Wulanda dan yang tersayang Muhammad Sabrion yang selalu membantu, menyemangati dan juga rekan-rekan Universitas Islam Kuantan Singingi yang tidak dapat disebutkan satu persatu terutama rekan-rekan Prodi Administrasi Negara angkatan 2015.
10. Berbagai pihak yang turut membantu dan menyediakan waktunya demi terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhinya penulis mendo'akan agar Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya yang berlipat ganda untuk segala kelancaran yang telah diberikan dan besar harapan peneliti, semoga skripsi ini bermamfaat bagi pembaca.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Affiffuddin, 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*. Alfabeta: Bandung
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Ambar, Teguh, Sulistiyani, Rosidah, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Andri Alshar dan Khotami. 2018. *Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : CV Budi Utama
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung

*Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka*

*Budiharto, Widodo. 2010. Robotika : Teori + Implementasi. Yogyakarta : Andi*

*Danang, Sunyoto. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Buku. Seru*

*Edison, Emron, dkk, 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Alfabeta, cv. Bandung.*

*Fariad, Ali. 2015. Teoridan Konsep Administrasi dari pemikiran para digmatic menuju redefinisi. Rajawali Pers. Jakarta.*

## **B. Dokumentasi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2015-2020

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018